

# **STUDI TENTANG PROGRAM KEBENCANAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA SAMARINDA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**A. Rafiq<sup>1</sup>, Adam Idris<sup>2</sup>, Sugandi<sup>3</sup>**

## ***Abstract***

*The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of the Disaster in the description of flood disaster management at the stage of pre-disaster, emergency response, and disaster.*

*The results of the analysis that the Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) in East Kalimantan Province disaster relief efforts in the city of Samarinda, the implementation of a continuous course required from planning, implementation and outcomes of disaster management with an integrated, scalable, structured and purposeful involving all involved institutions from government, business and society, resulting in a catastrophic flood disaster especially minimized.*

**Keywords:** *Planning, Disaster Management, Flood*

## ***Abstrak***

*Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa gambaran pelaksanaan Program Kebencanaan dalam penanggulangan bencana banjir pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.*

*Hasil analisis bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya-upaya penanggulangan bencana di Kota Samarinda, dibutuhkan pelaksanaan yang berkesinambungan tentunya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil dari penanggulangan bencana dengan secara terpadu, terukur, terstruktur dan terarah yang melibatkan seluruh institusi terlibat baik dari pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, sehingga dalam penanggulangan bencana terutama bencana banjir diminimalisir.*

**Kata Kunci :** *Perencanaan, Penanggulangan Bencana, Banjir*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: andraku2002@yahoo.com

<sup>2</sup> Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman

<sup>3</sup> Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman

## Pendahuluan

### *Sejarah Bencana Provinsi Kalimantan Timur*

Dalam Undang Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termasuk didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila.<sup>4</sup> Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut, maka diterbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan pra bencana, tanggap darurat pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Kondisi Kalimantan Timur secara empiris dapat dilihat dengan perubahan kondisi biogeofisik alam, pemanasan global dan perubahan iklim, degradasi sumberdaya alam dan lingkungan menimbulkan berbagai fenomena alam yang memicu terjadinya bencana, seperti El Nino yang menyebabkan kekeringan/kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan serta gangguan asap; La Nina yang menyebabkan curah hujan melebihi normal sehingga menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor dan dampak-dampak lain yang ditimbulkannya, seperti kerawanan pangan, timbulnya hama dan penyakit.

### *Sejarah Bencana Kota Samarinda*

Kota Samarinda memiliki sejarah kebencanaan yang cukup kompleks. Tercatat sebanyak 6 jenis bencana pernah terjadi di Kota Samarinda dimana bencana banjir serta kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana dengan tingkat frekuensi kejadian paling tinggi seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.2** Sejarah Kejadian Bencana di Kota Samarinda tahun 2012

KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA LUKA	HILANG	MENDE RITA	MENGUNG SI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN
BANJIR	21	7	243	-	139.592	15.480	2.000	41
KEBAKARAN HUTAN & LAHAN	22	-	-	-	-	4	-	-
KEKERINGAN	2	-	-	-	-	-	-	-
KONFLIK SOSIAL	1	-	-	-	-	156	-	-

<sup>4</sup> Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA LUKA	HILANG	MENDEKITA	MENGUNSI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN
CUACA EKTRIM	4	-	3	-	597	-	11	61
TANAH LONGSOR	3	-	-	-	122	-	23	7
<b>JUMLAH</b>	<b>53</b>	<b>7</b>	<b>246</b>	<b>-</b>	<b>140.311</b>	<b>15.640</b>	<b>2.034</b>	<b>109</b>

*Sumber: Data & Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2012*

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai Studi tentang program kebencanaan dalam penanggulangan bencana banjir dikota Samarinda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim. Selain itu untuk memastikan kiranya langkah-langkah apa yang dilakukan oleh BPBD dalam menyusun program kebencanaan dalam melaksanakan fungsi untuk menentukan sasaran kegiatan yang efektivitas dan rasional. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang program kebencanaan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Samarinda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka hal tersebut dapat dilakukan melalui kajian ilmiah yaitu melalui penelitian lapangan.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Penanggulangan Bencana***

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis

Banjir adalah tinggi muka air melebihi normal pada sungai dan biasanya mengalir meluap melebihi tebing sungai dan luapan airnya menggenang pada suatu daerah genangan (Hadisusanto, 2011)<sup>5</sup> Selain itu, banjir menjadi masalah dan berkembang menjadi bencana ketika banjir tersebut mengganggu aktivitas manusia dan bahkan membawa korban jiwa dan harta benda (Sobirin, 2009)<sup>6</sup>.

Secara umum penyebab banjir dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu banjir yang disebabkan oleh sebab-sebab alami dan banjir disebabkan oleh tindakan manusia (Kodoatie dan Sugiyanto, 2002)<sup>7</sup>

Banjir merupakan fenomena alam yang tidak dapat dicegah, melainkan dapat dikurangi akibat yang ditimbulkannya. Peristiwa banjir merupakan akibat dari berbagai penyebab, seperti terjadinya curah hujan yang tinggi dan lama,

<sup>5</sup> Hadisusanto, N. (2011), Aplikasi Hidrologi, Jogja Mediautama, Jogjakarta.

<sup>6</sup> Sobirin, S. (2009), Kajian Strategis Solusi Banjir Cakungangan Bandung, Seminar Nasional Teknik Sumber Daya Air, Bandung

<sup>7</sup> Kodoatie, R. J, dan Sugiyanto, (2002), Banjir, Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya Dalam Perspektif Lingkungan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

serta ditambah dengan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak mampu menahan air hujan sehingga menimbulkan aliran permukaan (run off) yang besar. Meskipun faktor alam memberikan kontribusi penyebabnya namun faktor manusia juga memberikan andil yang besar terhadap terjadinya banjir. Salah satunya adalah terjadinya penjarahan hutan yang mengakibatkan gundulnya daerah aliran sungai.

### ***Teori Perencanaan***

Bintoro Tjokroaminoto mendefinisikan perencanaan sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu<sup>8</sup>.

Pramuji Atmosudirdjo mendefinisikan perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bilamana, dimana, dan bagaimana melakukannya.

SP. Siagian mengartikan perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang menyangkut hal-hal yang akan dikerjakan di masa datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya<sup>9</sup>. Y.Dior berpendapat perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang, dalam rangka mencapai sasaran tertentu. Berbagai pendapat diatas menyiratkan bahwa perencanaan merupakan proses yang berisi kegiatan-kegiatan berupa pemikiran, perhitungan, pemilihan, penentuan dsb. Yang semuanya itu dilakukan dalam rangka tercapainya tujuan tertentu. Pada hakekatnya perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternative (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Dari beberapa pendapat-pendapat tersebut dapat difahami bahwa program kebencanaan pada BPBD Provinsi Kalimantan Timur merupakan kegiatan yang terencana dengan perhitungan pemikiran dan menentukan langkah secara matang yang akan dikerjakan di masa datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga penanggulangan bencana terutama masalah banjir di Kota Samarinda dapat teratasi atau berkurangnya risiko bencana yang ditimbulkan.

---

<sup>8</sup> Bintoro, Tjokroamidjojo. (1991), *Manajemen Pembangunan*, CV. Haji Masagung, Jakarta.

<sup>9</sup> Pamudji, S. (1995), *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Gunung Agung Jakarta

### ***Teori Pembangunan***

Definisi pembangunan menurut Suryono (2010) adalah : pembangunan berarti upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki lima implikasi utama yaitu:

- a) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal baik individu maupun kelompok (capacity).
- b) Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan (equity).
- c) Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment).
- d) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (sustainability).
- e) Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (interdependence).

Inti dari perencanaan pembangunan dalam penanggulangan bencana terutama banjir yaitu dengan menentukan program dan kegiatan yang dilakukan atas kajian-kajian yang memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Samarinda. Panduan dijabarkan dalam visi, misi, kebijakan, program dan berbagai fokus kegiatan. Fokus kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa sebelum, saat dan setelah terjadi bencana diterjemahkan menjadi berbagai sasaran, institusi penanggung jawab serta alokasi anggaran. Perencanaan ini menjadi mandat Pemerintah Kota Samarinda dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan. Selain itu, dokumen ini juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan pemantauan dan evaluasi dari perencanaan yang telah disusun.

### ***Teori Lingkungan***

Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. (Darsono, 1995)<sup>10</sup>

Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Perusahaan sendiri sesuai konsep masa kini merupakan kumpulan dari berbagai macam sumber daya, kapabilitas dan

---

<sup>10</sup> Darsono, Valentinus. (1995), *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Universitas Atmajaya Press, Yogyakarta.

kompetensi yang selanjutnya bisa digunakan untuk membentuk market position tertentu. Dengan demikian analisis lingkungan internal akan meliputi analisis mengenai sumber daya manusia, kapabilitas dan kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan. Masing-masing komponen dari analisis lingkungan internal.

Lingkungan eksternal meliputi variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan societal ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi di dalam lingkungan kerja (industri) organisasi. Variabel-variabel eksternal ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ancaman dan peluang, yang mana memerlukan pengendalian jangka panjang dari manajemen puncak organisasi.

Ada dua lingkungan yang berpengaruh disini, yaitu lingkungan societal dan lingkungan kerja. Lingkungan societal meliputi tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas, misalnya tekanan di bidang ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya. Tekanan ini terutama sering berpengaruh pada keputusan jangka panjang organisasi. Sementara itu, lingkungan kerja memasukkan semua elemen yang relevan dan mempengaruhi organisasi secara langsung. Elemen-elemen tersebut dapat berupa pemerintah, kreditur, pemasok, karyawan, konsumen, pesaing, dan lainnya.

### ***Pengertian Ekologi***

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan makhluk hidup dengan komponen sekitarnya. (Soemarwoto, 2004)<sup>11</sup>

Hubungan pembangunan, perencanaan pembangunan, lingkungan dengan program kebencanaan penanggulangan banjir dimana pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan dengan pengalokasian dana atau anggaran, setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat.

Aspek penting lain dari perencanaan tata ruang dan kaitannya dengan pengurangan resiko bencana adalah fakta bahwa perencanaan dapat pula berfungsi sebagai media pengambilan keputusan dalam pembangunan. Dengan demikian keputusan dalam bentuk kebijakan pembangunan dapat diarahkan untuk mengurangi komponen pembentuk resiko, baik menghindari lokasi bahaya, mengeliminasi kerentanan, sampai dengan memperkuat kapasitas. Sistem Infomasi Geografis (SIG) adalah mata rantai yang mampu mengaitkan hal tersebut. SIG mampu menciptakan protokol pengambilan keputusan untuk

---

<sup>11</sup> Soemarwoto, Otto. (2004), *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.

manajemen lahan dengan mengembangkan model hubungan antara environmental values (termasuk komponen pembentuk kerentanan) dengan berbagai data layer pada suatu wilayah perencanaan. Peran dalam pembangunan berkelanjutan pasca bencana, pada saat tanggap darurat dapat memberikan informatif dan komunikatif sehingga membantu pengambilan keputusan serta pada jangka menengah dan panjang dapat menjadi basis utama dalam pembangunan.

Bencana yang merupakan sebuah gangguan serius terhadap berfungsinya sebuah komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian dan dampak yang meluas terhadap manusia, materi, ekonomi dan lingkungan, yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak tersebut untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Lingkungan terhadap suatu kejadian bencana, maka akan mempengaruhi sistem-sistem yang ada baik pengaruh dari manusia maupun lingkungan, sehingga berdampak pula pada sendi kehidupan masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Dengan demikian dapat pembangunan, perencanaan pembangunan, lingkungan, bila dikaitkan dengan program kebencanaan merupakan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya saling menunjang didalam pembangunan yang menuju kerah yang lebih baik, terhadap lingkungan dengan yang kondisi alam dan lingkungan perlu upaya-upaya secara nyata dengan suatu perencanaan dengan pembiayaan yang didukung oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian Deskriptif Kualitatif. Sesuai ruang lingkup penelitian yang ditetapkan maka yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut :

- a. Program Kebencanaan pada BPBD Provinsi Kalimantan Timur meliputi :
  - 1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana ;
  - 2) Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana;
  - 3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- b. Penanggulangan Bencana Banjir BPBD Provinsi Kalimantan Timur meliputi :
  - 1) Sumber Daya Manusia Penanggulangan Bencana;
  - 2) Penyusunan Database dan pemetaan rawan bencana;
  - 3) Sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
  - 4) Penyelenggaraan Pasca Bencana.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dari hasil penelitian bahwa Kota Samarinda memiliki beberapa potensi bencana, selain disebabkan oleh aktivitas alam, kota ini juga memiliki potensi bahaya yang disebabkan oleh manusia (non alam) seperti kebakaran (bangunan,

pemukiman, hutan dan lahan), tanah longsor banjir, agin beliung dan lain-lain. Karakteristik kondisi biofisik DAS Sub DAS di Kalimantan Timur secara umum relatif rentan terhadap kemungkinan terjadinya erosi, sedimentasi dan banjir. Kerentanan tersebut ditopang oleh dominasi jenis tanah yang relatif peka terhadap erosi, dominasi topografi bergelombang sampai berbukit-bukit, peluang curah hujan relatif tinggi dan dominasi pola jaringan sungai (drainage network). Dari identifikasi data, diperoleh potensi bahaya bencana banjir di Kota Samarinda dapat dilihat pada berikut ini :

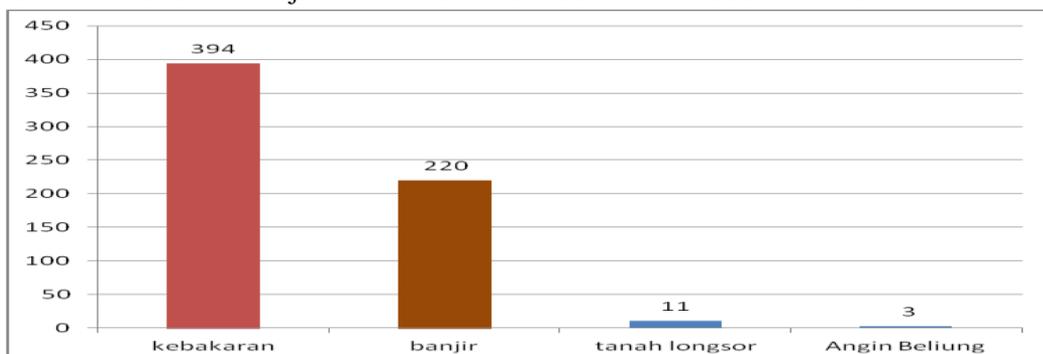
Tabel 4.11 Jumlah Kejadian Bencana dari Tahun 2009 - 2013 Kota Samarinda

No.	Tahun	Jenis Bencana Kota Samarinda				Total
		Kebakaran	Tanah Longsor	Banjir	Angin Beliung	
1	2009	103	-	64	-	167
2	2010	83	-	63	2	148
3	2011	53	-	65	-	118
4	2012	60	2	21	-	83
5	2013	95	9	7	1	112
	<b>Total</b>	<b>394</b>	<b>11</b>	<b>220</b>	<b>3</b>	<b>628</b>

Sumber : Pusdalops BPBD Prov. Kaltim

Berdasarkan laporan yang diterima dari 14 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan dari tahun 2009 - 2013, tercatat sebanyak 628 kejadian, dan bencana yang paling sering terjadi adalah kebakaran sebanyak 394 kali dan banjir sebanyak 220 kali, tanah longsor 11 kali, angin puting beliung 3 kali. Laporan kejadian ini tidak semua kabupaten/kota secara rutin menyampaikannya kepada BPBD Prov. Kaltim. Data sementara kejadian bencana yang terjadi di Kalimantan Timur pada tahun 2013 disajikan pada grafik berikut :

Gambar 4.5 Grafik Kejadian Bencana Kota Samarinda 2009 s.d 2013



Sumber :Hasil Pengolahan Data Primer Tahun 2013

Dari tabel 4.11 dan gambar 4.5 diatas bencana yang sering terjadi adalah kebakaran dengan 394 kejadian, banjir 220 kejadian, tanah longsor 11 kejadian dan angin beliung 3 kejadian. Bencana dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan, Adapun sejauh ini kebakaran hutan dan lahan sering terjadi meskipun tidak banyak memberikan dampak yang signifikan bagi korban jiwa dan kerugian harta. Sedangkan daerah tepi sungai dan rawa serta dataran rendah sudah sering mengalami bencana banjir yang sangat memberikan dampak terhadap penduduk, bangunan pemerintah, ekonomi masyarakat, infra struktur umum, fasilitas sekolah, sarana kesehatan. Jenis tingkat ancaman bencana di Kota Samarinda berdasarkan pada skala ancaman masing-masing jenis bencana dan skala penduduk terpapar di Kota Samarinda, dapat dilihat pada Gambar 4.6 di bawah ini.

Gambar 4.6. Matrik Penentuan Tingkat Ancaman Bencana di Kota Samarinda

TINGKAT ANCAMAN		INDEKS PENDUDUK TERPAKAR		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
INDEKS ANCAMAN	RENDAH	EPIDEMIA DAN WABAH PENYAKIT		KONFLIK SOSIAL
	SEDANG		CUACA EKSTREM; KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN; KEKERINGAN; TANAH LONGSOR	
	TINGGI	BANJIR		

	TINGKAT ANCAMAN BENCANA RENDAH
	TINGKAT ANCAMAN BENCANA SEDANG
	TINGKAT ANCAMAN BENCANA TINGGI

Sumber : Bidang Kesiapsiagaan BPBD Prov. Kaltim

Matrik di atas menggambarkan bahwa tingkat ancaman masing-masing jenis bencana di Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- a) Bencana epidemi dan wabah penyakit, memiliki tingkat ancaman **RENDAH** di Kota Samarinda.
- b) Bencana banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor dan konflik sosial memiliki tingkat ancaman **SEDANG** di Kota Samarinda.
- c) Bencana banjir memiliki tingkat ancaman **SEDANG** di Kota Samarinda.

Kesimpulan dari indeks ancaman bencana disusun berdasarkan dua komponen utama, yaitu kemungkinan terjadi suatu ancaman dan besaran dampak yang pernah tercatat untuk bencana yang terjadi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik “tingkat ancaman banjir di kota Samarinda masih dalam kategori **SEDANG**, karena bencana banjir yang terjadi di setiap titik daerah rawan banjir baik ketinggian air maupun masa genangan tidak terlalu lama”.

Sehingga untuk penanganan tanggap darurat belum diperlukan, karena mengacu pada Undang-Undang No 24 Tahun 2007, dimana tanggap darurat dilakukan bila ada pernyataan darurat oleh Kepala Daerah.

Tingkat risiko bencana kota samarinda didapat dari hasil penggabungan tingkat ancaman, tingkat kerugian serta tingkat kapasitas untuk setiap jenis bencana di Kota Samarinda. kesimpulan tingkat risiko bencana di Kota Samarinda seperti yang terlihat pada Tabel 4.16 berikut :

Tabel 4. 16 Tingkat Risiko Bencana di Kota Samarinda

NO	NAMA BENCANA	TINGKAT RISIKO
1	BANJIR	TINGGI
2	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI
3	KEKERINGAN	TINGGI
4	KONFLIK SOSIAL	SEDANG
5	CUACA EKSTRIM	TINGGI
6	TANAH LONGSOR	TINGGI
7	EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	RENDAH

Sumber : Bidang Kedaruratan dan Logistik

Gambar 4.8 Matrik Penentuan Tingkat Risiko Bencana di Kota Samarinda

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
TINGKAT KERUGIAN	RENDAH		EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT;	KONFLIK SOSIAL;
	SEDANG			CUACA EKSTRIM; BANJIR; KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN; KEKERINGAN; TANAH LONGSOR;
	TINGGI			

	TINGKAT RISIKO BENCANA RENDAH
	TINGKAT RISIKO BENCANA SEDANG
	TINGKAT RISIKO BENCANA TINGGI

Sumber : Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Berdasarkan Tabel 4.16 dan Gambar 4.8 di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko **TINGGI** di Kota Samarinda berpotensi terjadi adalah bencana banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor, sedangkan untuk bencana konflik sosial memiliki tingkat risiko **SEDANG** serta epidemi dan wabah penyakit memiliki tingkat risiko **RENDAH**.

Pembahasan penelitian Studi Tentang Program Kebencanaan Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Samarinda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Permasalahan banjir di Kota Samarinda adalah masalah yang kompleks, yang memiliki dampak berpengaruh terhadap lingkungan, rumah penduduk masyarakat, infrastruktur umum, bangunan pemerintah, sekolahan, sarana kesehatan yang sangat mengganggu dan menjadi kendala dalam melakukan aktifitas dan pembangunan.
2. Program dalam perencanaan kebencanaan terutama pengendalian banjir di Kota Samarinda yaitu :
  - a) Fungsi Program kebencanaan terhadap perencanaan penanggulangan bencana banjir di Kota Samarinda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi sudah diterapkan melalui APBD dan APBN dengan mengacu Rencana Strategi (Renstra) Pemerintah Provinsi dan disinkronisasikan dengan Renstra Penanggulangan Bencana yang disusun untuk rentang selama 5 (lima) tahun.
  - b) Mekanisme untuk menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan oleh Kota Samarinda. Pelaksanaan rencana penanggulangan bencana membutuhkan komitmen yang kuat dari pihak terkait baik secara politis maupun teknis. Strategi program kebencanaan dalam penanggulangan bencana banjir ini diharapkan dapat membangun komitmen secara optimal pada seluruh jenjang baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Samarinda, sehingga penanggulangan bencana terutama dalam penanggulangan bencana banjir dapat terwujud untuk masyarakat, meskipun belum dapat dilaksanakan secara optimal tetapi secara aplikatif program kebencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan telah memberikan kontribusi yang cukup berarti untuk mendukung kegiatan kebencanaan terutama masalah banjir.
3. Penanggulangan Bencana Banjir :
  - a) Peringatan dini banjir Early Warning System (EWS) sebagai awal untuk mendeteksi akan terjadinya banjir dengan sistem informasi berbasis SMS, dengan menghasilkan data dan peringatan dini sebagai informasi bagi masyarakat.
  - b) Pembuatan Saluran Pengendalian Banjir Secara umum fungsi saluran drainase adalah untuk mengurangi kelebihan debit air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan/lahan, sehingga fungsi kawasan/lahan tidak terganggu.
  - c) Dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kebencanaan terutama dalam penanggulangan banjir, masih sangat diperlukan pengadaan peralatan yang lebih menunjang untuk dapat

mengatasi terjadinya banjir, seperti : pompa air, makanan siap saji dan kebutuhan rumahtangga lainnya.

4. Koordinasi program perencanaan kebencanaan yang dilakukan BPBD Provinsi Kaltim kepada pemangku kepentingan (stakolder) sebagai upaya untuk meningkatkan peran terhadap semua kegiatan penanganan bencana banjir di Kota Samarinda ternyata tidak dibarengi dengan perencanaan secara bersama, sehingga program kebencanaan yang dilakukan masih kurang membawa dalam pengurangan risiko bencana.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi program kebencanaan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Samarinda, meskipun sudah ada beberapa pelaksanaan yang dilakukan namun belum dapat secara optimal, tetapi secara aplikatif perencanaan program yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan kontribusi yang cukup berarti untuk mendukung kegiatan bencana banjir. Kurang optimalnya dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Samarinda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tergambar pada perencanaan program dari tahun 2011,2012 dan 2013 yang masih belum optimal dilakukan perencanaan program penanganan banjir dan maupun pasca sesuai rencana.
2. Permasalahan banjir di Kota Samarinda adalah masalah yang kompleks, yang tercermin memiliki tingkat risiko, ancaman, kerugian, korban jiwa dan harta benda bagi masyarakat warga kota Samarinda secara umum, sehingga dapat mengganggu aktifitas warga dan pembangunan di Kota Samarinda.
3. Koordinasi program perencanaan kebencanaan yang dilakukan BPBD Provinsi Kalimantan Timur kepada pemangku kepentingan (stakolder) sebagai upaya untuk meningkatkan peran terhadap semua kegiatan penanganan bencana banjir di Kota Samarinda ternyata tidak dibarengi dengan perencanaan secara bersama, sehingga program kebencanaan yang dilakukan masih kurang membawa dampak dalam pengurangan risiko bencana banjir.

### **Saran-Saran**

Dari hasil kesimpulan sebagaimana yang diuraikan di atas, saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

Melihat kejadian bencana banjir dikota samarinda yang menunjukkan angka rata rata kejadian dari dampak risiko, ancaman, kerugian, korban jiwa dan harta benda dalam penanggulangan bencana banjir di kota Samarinda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka penulis

menyarankan segera dilakukannya perencanaan secara terkoordinasi, agar pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di Kota Samarinda dapat ditanggulangi atau menimalisir terjadinya banjir dengan dilakukan sebagai berikut :

1. Mengalokasikan program dan kegiatan kebencanaan dalam penanggulangan bencana banjir sebaiknya dilakukan dalam tahap Prabencana, tanggap darurat serta pascabencana dengan cara koordinasi antar bidang pada saat penyusunan rencana kerja.
2. Menginformasikan bahaya bencana banjir kepada masyarakat sebaiknya dilakukan kegiatan-kegiatan Sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat dalam kesadaran lingkungan dan bahaya banjir dengan bekerja sama pada instansi/ lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, Puskesmas.
3. Menjalinkan koordinasi dalam penanggulangan bencana banjir sebaiknya dalam penyusunan perencanaan melibatkan peran serta SKPD Pemerintah Provinsi/ Kota dan instansi vertikal, dengan cara melakukan rapat koordinasi yang selanjutnya diusulkan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

#### **Daftar Pustaka**

- Anonimus, *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. tentang Penanggulangan Bencana, dimana Pemerintah Daerah wajib membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)*.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 1991. *Manajemen Pembangunan*, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Darsono, Valentinus, 1995. *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Universitas Atmajaya Press, Yogyakarta.
- Hadisusanto, N. 2011. *Aplikasi Hidrologi, Jogja Mediautama*, Jogjakarta.
- Kodoatie, R. J, dan Sugiyanto, 2002. *Banjir, Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya Dalam Perspektif Lingkungan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Pamudji, S. 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Gunung Agung Jakarta
- Sobirin, S. (2009). *Kajian Strategis Solusi Banjir Cakungangan Bandung*, Seminar Nasional Teknik Sumber Daya Air, Bandung.
- Soemarwoto, Otto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.